

EDISI : Kamis, 10. Oktober 2019

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :  
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL  
SETDA KABUPATEN BULELENG

**RESUME BERITA**

EDISI :Kamis, 10 Oktober 2019

NO	NAMA MEDIA	JUDUL BERITA	RESUME	KET.
1	FAJAR BALI	Suradnyana Akan Tinjau Lahan Bekas Pasar Banjar	Para tokoh masyarakat yang ada di Desa Banjar, Kecamatan Banjar mendatangi Bupati Bulelelmg Putu Agus Suradnyana. Kedatangan para tokoh baik dari tokoh adat dan Geria Ageng Desa Banjar untuk memohonkan lahan bekas pasar desa yang ada di dusun Melanting, Desa Banjar yang kini tidak dimanfaatkan untuk dijadikan kantor kepaa desa. Hal itu diungkapjan oleh Kelian Desa Adat Banjar Ida Bagus Kosola saat diterima di Loby Kantor Bupati Buleleng, rabu (9/10) kemarin pagi.	
		Anggota Dewan Malas Diancom Tidak dapat Perjalanan Dinas	Para wakil rakyat yang duduk di DPRD Kaupaten Buleleng utamanya yang malas diancam tidak akan mendapatkan perjalanan dinas. Ancaman tersebut diungkapkan oleh ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna saat dikonfirmasi beberapa hari kemarin. Menurut Supriatna dalam memberikan ancaman kepada seluruh anggota dewan yang malas hal itu dilakukan untuk menerapkan kedisiplinan para wakil rakyat dalam mengikuti beberapa agenda yang telah tersusun melalui Badan Musyawarah (Bansmus) DPRD Kabupaten Buleleng.	
		Pramuka Diminta Sukseskan Visi Gubernur	Gerakan Pramuka sebagai lembaga pendidikan nonformal di sekolah dan di luar keluarga, memiliki sistem pendidikan yang sangat holistic dengan Desa Pramuka diharapkan dapat ikut ambil bagian dalam wujudkan visi pembangunan Pemerintsh Provinsi Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali".	



## KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali post

Kategori : Pemkab

# Penggabungan OPD Eselon IV Tak Semua Di-"cover", Eselon II, III-A, III-B Aman

Adanya rencana penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pihak eksekutif tidak saja fokus membahas perubahan regulasi bersama DPRD Buleleng. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) mempersiapkan pengisian sumber daya manusia (SDM), sembari menunggu pembahasan rancangan perda itu rampung. Dengan digabungkannya tiga OPD itu, dipastikan ada pejabat yang "menganggur" alias tidak dapat jabatan. Dari pejabat yang ada, pejabat eselon berapa yang tidak bisa ditampung aman kedudukannya?

**INFORMASI** yang dikumpulkan di lapangan, Rabu (9/10) kemarin, draf Ranperda tentang Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah itu, diusulkan tiga OPD sekaligus digabung.

Masing-masing Dinas Statistik digabung dengan Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (Kominfo-Sandi). Dinas Ketahanan Pangan dijadikan satu dengan Dinas Perikanan, dan Dinas Kop-

erasi digabung dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin).

Setelah ketiga OPD itu di-merger, maka jabatan eselon II (kepala dinas - red) akan hilang. Selanjutnya, pejabat yang memenuhi syarat dengan jabatan eselon II itu harus di-cover. Kalau dari pejabat yang pensiun pada 2020 ini, maka dipastikan pejabat bersangkutan yang merebut jabatan tersebut.

Sementara jabatan eselon III-A (setingkat kepala bidang), dan eselon III-B (setingkat sekretaris) setelah dilakukan penggabungan OPD tersebut diperkirakan

ada delapan orang. Pejabat tersebut dipastikan menduduki job-nya setelah OPD digabung. Berbeda dengan eselon IV (setingkat kepala seksi) diperkirakan jumlahnya sebanyak 21 orang. Karena stok pejabat ini tergolong banyak, maka kemungkinan besar setelah penggabungan OPD nanti, mereka itu tidak mendapatkan job. Ini tidak bisa dihindari, nasibnya akan ditentukan masa pensiun pejabat dengan golongan eselon sama.

Kepala BKPSDM Buleleng Gede Wisnawa mengatakan, sejauh ini telah dilakukan kajian teknis dan juga pemetaan

untuk menempatkan pejabat tersebut. Dari kajian sementara, mendistribusikan pejabat eselon II, III-A, III-B dan eselon IV itu dilakukan dengan cara *rolling* jabatan. Sedangkan promosi jabatan, kata Wisnawa, tidak akan dilakukan. Apalagi lelang jabatan dipastikan tidak dilakukan setelah OPD itu digabung.

"Kami sudah melakukan meping. Untuk eselon II posisinya aman, termasuk eselon III-A dan eselon III-B. Yang menjadi masalah adalah eselon IV. Pejabat eselon IV ini mungkin tidak bisa di-cover keseluruhan," katanya.

Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Buleleng itu menambahkan, skema seperti itu ditempuh karena pejabat yang sebelumnya memangku jabatan tersebut akan menginjak masa pensiun. Untuk itu, kekosongan jabatan itu harus segera ditutupi. Terkait penggantinya akan dipertimbangkan *skill* dan kualifikasi pendidikannya.

"Karena banyak yang pensiun, sehingga harus diisi, tetapi tidak bisa mengambil pejabat di lembaga bersangkutan. Namun, kita cari dari lainnya dengan mempertimbangan *skill* termasuk

kualifikasi pendidikannya," jelasnya.

Terkait, kemungkinan pejabat tidak dapat jabatan. Skema yang mau tidak mau harus dilakukan dengan tidak memberikan jabatan kepada pejabat bersangkutan. Rencananya, kebijakan ini dilakukan menunggu sampai pejabat lainnya memasuki masa pensiun. Setelah itu pejabat bersangkutan baru diberikan jabatan.

"Yang tidak dapat jabatan sementara menunggu dulu hingga ada yang pensiun baru diberikan jabatan pengganti," kata Birokrat asal Desa Banyuatis, Banjar ini. (mud)



## KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media :

Bali post

Kategori :

pebukab

# Status Hukum PDAM Diubah Jadi Perumda

Singaraja (Bali Post) – Status badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Buleleng akan diubah mulai tahun 2020 nanti. Sekarang pemerintah baru mengajukan rancangan peraturan daerah (ranperda), yang dijadikan dasar perubahan status badan hukum perusahaan itu.

Selama ini status lembaga PDAM itu masih sebagai Perusahaan Daerah (PD). Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Maka, Pemkab sendiri harus segera mengubah status badan hukum itu.

Dari draf rancangan perda itu, ada dua pilihan perubahan status, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perseroan Daerah (Perseroda).

Dari dua alternatif itu, Pemkab lebih tertarik mengubah status hukum PDAM menjadi Perumda. Menyusul rencana perubahan nama itu, Pemkab sudah mengajukan ranperda Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) agar mulai dibahas.

Direktur Utama (Dirut) PDAM Buleleng Made Lestariana belum lama ini mengatakan, selama ini perusahaan yang dikelolanya itu bergerak memanfaatkan pelayanan air minum yang notabene pelayanan dasar. Sejak didirikan perusahaan ini hanya satu pemilik yaitu pemerintah daerah. Dengan pertimbangan itu dan mengikuti amanat regulasi terbaru, sehingga pihaknya lebih condong me-

milih status hukum PDAM menjadi Perumda.

Dengan perubahan status badan hukum itu, kata Lestariana, maka otomatis ada perubahan fungsi dan tatanan organisasi. Dia mencontohkan, salah satu perubahan tatanan organisasi itu adalah dibentuknya Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam hal ini pemerintah daerah sebagai pemilik modal utama, Dewan Pengawas dengan sejumlah komite di dalamnya, serta Direksi Perusahaan.

KPM memiliki kewenangan cukup besar. Mengingat Pemilik Modal bisa menentukan nilai keuntungan yang harus disetorkan pada pemerintah daerah. Bila mengacu pada regulasi lama, PDAM menyerahkan deviden keuntungannya pada pemerintah hanya 55 persen dari laba bersih.

“Sebagai KPM-nya adalah kepala daerah. Salah satu kewenangannya adalah menentukan proporsi deviden yang wajib dipenuhi perusahaan. Nanti bisa saja ada skala prioritas. Seperti dana cadangan dan peningkatan kualitas dan kontinuitas layanan,” tegasnya serius. (kmb38)



Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

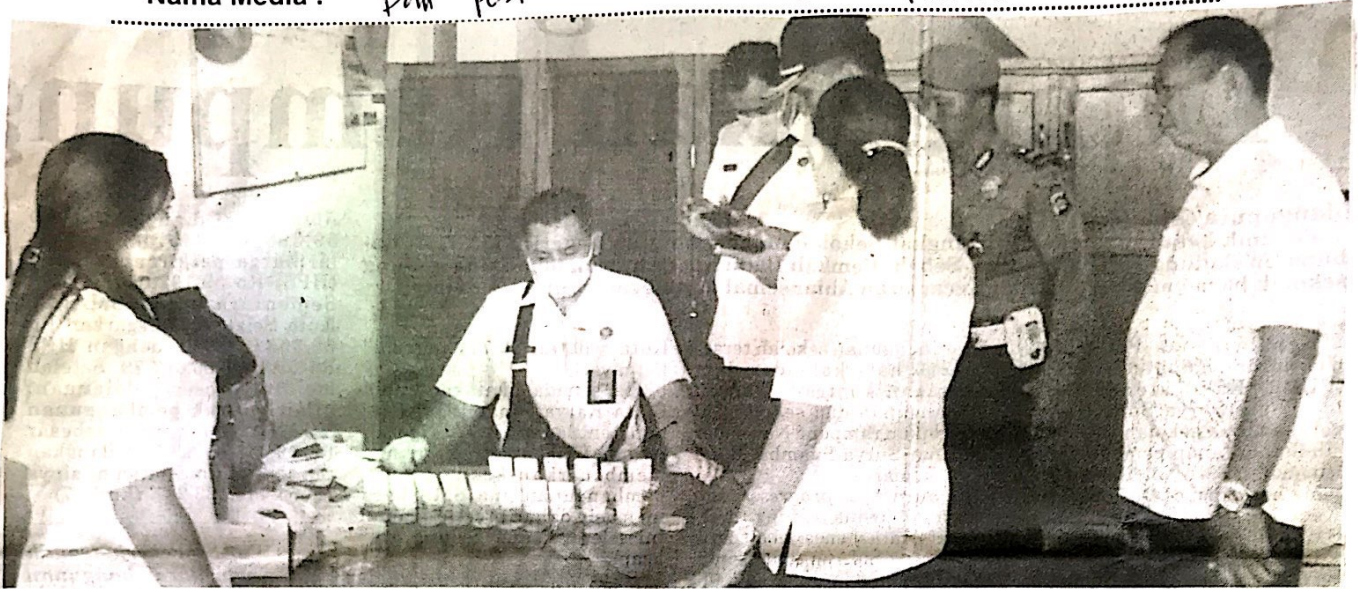
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



## KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali post

Kategori : Kesehatan



Bali Post/kmb38

TES URINE - Belasan anggota Satnarkoba dan kesatuan lain di Polres Buleleng mengikuti tes urine, Rabu (9/10) kemarin.

# Belasan Personel Satnarkoba Ikuti Tes Urine

Singaraja (Bali Post) -

Pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba lewat tes urine kembali dilancarkan jajaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng. Kali ini anggota Satuan Narkoba (Satnarkoba) dan kesatuan lain di Polres Buleleng mengikuti tes urine, Rabu (9/10) kemarin. Tes urine yang dilakukan dadakan ini dipimpin Kepala BNNK AKBP Gede Astawa.

Sebelum tes urine, dilakukan apel dipimpin Wakapolres Buleleng Kumpul Loduyk Tapilaha, S.IK. Begitu apel berakhir, personel Satnarkoba dan dari kesatuan lain mengikuti tes urine. Satu per satu anggota kepolisian identitasnya dicatat dan dicek urinenya. Bahkan, Kasat Narkoba Polres Buleleng AKP Made Derawi tak luput dari tes urine tersebut. Dari hasil tes urine ini, para personel tersebut dinyatakan negatif dari pemakaian obat-obatan terlarang.

AKBP Astawa mengatakan, deteksi dini peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah menjadi program pencegahan bagi BNNK dan jajarannya.

Selain telah melakukan nota kesepahaman dengan instansi pemerintahan untuk melakukan tes urine bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pihaknya juga melancarkan hal serupa di jajaran Polres Buleleng. Guna merealisasikan program pencegahan itu, pihaknya melancarkan tes urin dengan menysasar personel Satnarkoba.

Alasan mengapa menysasar anggota Polri, terlebih jajaran Satnarkoba yang notabene kesehariannya melakukan penindakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, pihaknya ingin menunjukkan kepada publik kalau aparat penegak hukum dinyatakan

"bersih" dari pengaruh narkoba. Selain itu, lewat tes urine ini untuk mendeteksi secara dini terkait kemungkinan adanya anggota kepolisian yang terpapar narkoba.

"Ini kami lakukan sebagai bukti kerja sama dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kalau polisi sendiri sudah bebas narkoba, maka ini akan menjadi contoh dan bukti kepada publik kalau penegak hukum bersih dari pengaruh narkoba," katanya.

Sementara itu, Kumpul Loduyk Tapilaha didampingi Kasubag Humas Iptu Gede Sumarjaya menyambut baik upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

bagi anggotanya. Pihaknya tidak menampik kalau anggotanya ada yang dicurigai terpengaruh narkoba. Untuk itu, dengan mengikuti tes urine ini, Tapilaha menunjukkan kepada publik kalau jajarannya bersih dari pengaruh narkoba. Meski demikian, pihaknya tetap mengingatkan agar siapapun anggotanya agar tidak sesekali memakai narkoba.

Hal ini tidak saja merusak masa depan dan kalau terbukti terlibat kasus narkoba, maka sanksi tegas pasti akan diberikannya. Sanksi itu tidak lain adalah pemecatan sebagai anggota Polri. "Jangan sesekali terlibat, apalagi memakai narkoba. Kalau terbukti siapa pun itu sanksi berat sudah menanti. Untuk itu, tes urine yang dilakukan BNNK ini sangat baik dan kami dukung. Ini menunjukkan kepada masyarakat kalau kita sudah bersih narkoba," jelasnya. (kmb38)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG

2	NUSA BALI	Dilebur, Tiga Pejabat Eselon IIB 'Tidak Tersakiti'	Rencana peleburan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Buleleng, tidak berpengaruh terhadap pejabat Eselon IIB di jabatannya. Karena diwaktu bersamaan, ada juga pejabat Eselon IIB yang pension. Seangkan pejabat lainnya setingkat sekretaris dan kepala bidang, penempatannya kini tengah dogodok. Tiga lembaga yang dirancang dilebur, yakni Dinas Koerasi dikembalikan ke dinas perdagangan dan perindustrian .	
		Personel Polres Buleleng Dites Urine	Puluhan personel Polres Buleleng, rabu (9/10) mendapat tes urine men dadak dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Tes urine yang dilaksanakan itu untuk membuktikan penegak hukum yang biasanya menangani kasus penyalahgunaan narkoba bersih dari bbarang terlarang tersebut. Tes urine yang menysasar puluhan personel buleleng dilakukan sebelum apel pagi. Kepala BNNK Buleleng, AKBP I Gede Astawa, mengatakan tes urine adalah salah satu tugas BNN adalah pencegahan dan untuk itu atas seizing Kapolres Buleleng, pihak BNK melakukan tes urine terhadap personil satuan reserse narkoba yang dimaksudnkan sebagai langkah pencegahan tak hanya pada masyarakat umum tetapi juga aparat yang bertugas memberantas narkoba.	



## KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali post

Kategori : lalu lintas

# Ditabrak dari Belakang, Tiga Pengendara Motor Masuk RS Satu di Antaranya Balita

Singaraja (Bali Post) -

Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) terjadi di Jalan Singaraja - Gilimanuk kilometer 36.200 wilayah Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Selasa (8/10). Kejadian itu menyebabkan tiga orang korban terluka. Seorang korbannya masih bayi di bawah lima tahun (balita - red), bahkan menderita luka-luka serius. Ketiga korban itu sudah dilarikan ke rumah sakit di Kota Singaraja.

Lakalantas ini terjadi sekitar pukul 13.30 Wita. Diawali pengendara sepeda motor DK 7382 US I Gusti Made Darmayasa (35) asal Desa Tinga Tinga datang dari arah Gilimanuk menuju Singaraja. Saat itu, pengendara ini membonceng istrinya, Jro Made Sawitri (30. Tepat di tengah-tengah anaknya, Gusti Komang Yudistira (3), duduk di atas jok sepeda motor.

Saat melintas, korban berkendara beriringan dengan sepeda motor DK 7322-Q yang dikemudikan Gede Indra Bawa (32) juga warga dari tempat sama. Tiba di lokasi kejadian, korban hendak berhenti ke kiri jalan dan seketika menghentikan laju sepeda motornya. Saat itu, tiba-tiba sepeda motor kor-

ban ditabrak dari belakang.

Tak pelak, korban dan keluarganya terjatuh dari sepeda motornya. Nahas, istri dan anak yang masih balita itu mengalami luka-luka serius dan langsung diantar ke rumah sakit. Kondisi sama juga dialami pengendara Indra Bawa yang menabrak juga dirawat di rumah sakit, karena mengalami patah tulang. Sementara I Gusti Made Darmayasa dalam kondisi sehat.

Kapolsek Gerokgak Kompol Made Widana seizin Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.IK. membenarkan peristiwa lakalantas itu. Dari olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan saksi-saksi, kata Widana, disebutkan lakalantas itu dipicu

pengendara sepeda motor Indra Bawa yang kurang awas saat berkendara di jalan raya.

Pengendara diduga kurang memperhatikan situasi lalu lintas di depannya. Kendaraannya menabrak bagian samping sepeda motor yang ada di depannya. Karena benturan itu, dua kendaraan pun terjatuh hingga mengalami kerusakan. Seketika itu, pengendara dan penumpang ikut terjatuh dan mengalami luka-luka serius.

Kasus ini sudah ditangani aparat lantas Polres. Kasus itu dipicu kendaraan DK 7322 UQ yang dikendarai Gede Indra Bawa. "Dia tidak tahu ada kendaraan di depannya yang hendak menepi, kemudian mena-

brak kendaraan yang ada di depannya. "Kasusnya masih dikembangkan untuk proses lebih lanjut," jelasnya.

Tabrakan di Giri Emas

Sementara itu, lakalantas juga terjadi di Jalan Singaraja - Amlapura Km 8.100, tepatnya di pertigaan Jagaraga Banjar Dinas Dangin Yeh Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan. Dua sepeda motor dari arah berlawanan terlibat tabrakan, Selasa (8/10) sekitar pukul 21.00 Wita. Akibat kecelakaan itu dua orang pengendara mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas Iptu Gede Sumarjaya mengatakan, lakalantas itu berawal dari sepeda motor DK 3546 VK yang dikendarai Komang Suardana (35), warga Dusun Dauh Munduk, Desa Bungulan datang dari arah timur menuju barat ke kota. Saat melintas di lokasi kejadian,